

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan dalam mengukur seberapa besar tingkat kemajuan daerah yang dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya, serta menjadi indikator utama guna menilai berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan (Fahrurrozi et al., 2023). Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), IPM mencakup tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak. Yang selanjutnya terbagi menjadi empat indikator, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan (Badan Pusat Statistik, 2025). Di Indonesia, upaya peningkatan IPM telah menunjukkan hasil dengan capaian nasional sebesar 75,02 pada tahun 2024, yang menempatkan negara dalam kategori pembangunan manusia tinggi. Namun, dibalik capaian agregat nasional tersebut, tersembunyi realita kesenjangan pembangunan yang sangat dalam antar wilayah provinsi di Indonesia seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

No	38 Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	71,19	71,90	73,29	73,48	74,11	74,70	75,36
2	Sumatera Utara	71,18	71,74	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76
3	Sumatera Barat	71,73	72,39	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43
4	Riau	72,44	73,00	73,67	73,89	74,45	74,95	75,67
5	Jambi	70,65	71,26	72,29	72,62	73,11	73,73	74,36
6	Sumatera Selatan	69,39	70,02	71,62	71,83	72,48	73,18	73,84
7	Bengkulu	70,64	71,21	72,93	73,16	73,68	74,30	74,91
8	Lampung	69,02	69,57	71,04	71,25	71,79	72,48	73,13
9	Kep. Bangka Belitung	70,67	71,30	72,74	72,96	73,50	74,09	74,55
10	Kep. Riau	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89
11	DKI Jakarta	80,47	80,76	81,92	82,25	82,77	83,55	84,15
12	Jawa Barat	71,30	72,03	72,61	72,96	73,63	74,24	74,92
13	Jawa Tengah	71,12	71,73	71,88	72,17	72,80	73,39	73,87

14	DI Yogyakarta	79,53	79,99	79,95	80,22	80,65	81,09	81,62
15	Jawa Timur	70,77	71,50	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
16	Banten	71,95	72,44	74,41	74,68	75,25	75,77	76,35
17	Bali	74,77	75,38	76,52	76,69	77,40	78,01	78,63
18	Nusa Tenggara Barat	67,30	68,14	70,46	70,86	71,65	72,37	73,10
19	Nusa Tenggara Timur	64,39	65,23	66,93	67,02	67,63	68,40	69,14
20	Kalimantan Barat	66,98	67,65	68,76	68,99	69,71	70,47	71,19
21	Kalimantan Tengah	70,42	70,91	72,62	72,81	73,17	73,73	74,28
22	Kalimantan Selatan	70,17	70,72	73,09	73,45	74,00	74,66	75,19
23	Kalimantan Timur	75,83	76,61	75,94	76,60	77,36	78,20	78,79
24	Kalimantan Utara	70,56	71,15	71,00	71,57	72,21	72,88	73,41
25	Sulawesi Utara	72,20	72,99	73,67	74,03	74,52	75,04	75,68
26	Sulawesi Tengah	68,88	69,50	70,31	70,54	71,01	71,66	72,24
27	Sulawesi Selatan	70,90	71,66	73,08	73,38	73,96	74,60	75,18
28	Sulawesi Tenggara	70,61	71,20	71,61	71,82	72,38	72,94	73,62
29	Gorontalo	67,71	68,49	69,51	69,82	70,62	71,25	72,01
30	Sulawesi Barat	65,10	65,73	68,40	68,64	69,19	69,80	70,46
31	Maluku	68,87	69,45	71,34	71,55	72,04	72,75	73,40
32	Maluku Utara	67,76	68,70	69,30	69,56	70,26	70,98	71,84
33	Papua Barat	63,74	64,70	65,94	66,11	66,72	67,47	67,69
34	Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	69,65
35	Papua	60,06	60,84	60,44	60,62	61,39	63,01	73,83
36	Papua Selatan	-	-	-	-	-	68,24	68,86
37	Papua Tengah	-	-	-	-	-	59,44	60,25
38	Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	53,45	54,43
39	Indonesia	71,39	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS, diolah peneliti 2025

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pada tahun 2024 Provinsi dengan skor IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu 84,15 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi (≥ 80), sedangkan provinsi dengan skor IPM terendah adalah Papua Pegunungan, yaitu sebesar 54,43 yang termasuk dalam kategori rendah (≤ 60). Jarak yang lebar antara IPM DKI Jakarta dan Papua Pegunungan ini adalah cerminan nyata dari ketimpangan akses terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi di tengah masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata, yang mengakibatkan ketertinggalan pada beberapa wilayah.

Kesenjangan capaian pembangunan manusia tersebut merupakan potret makro yang membayangi seluruh daratan Pulau Papua yang secara administratif saat ini terbagi menjadi enam wilayah provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya (BPS, 2023). Secara agregat, seluruh wilayah otonom di Pulau Papua ini memiliki karakteristik permasalahan yang serupa, yaitu rendahnya pemenuhan indikator kesehatan dan pendidikan dasar, meskipun wilayah tersebut didukung oleh kapasitas sumber daya alam yang melimpah (Edyanto et al., 2021). Kondisi empiris ini menunjukkan bahwa perluasan struktur administrasi pemerintahan daerah di Pulau Papua belum mampu mengeksplorasi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal secara signifikan dan merata (Digdowiseso & Satrio, 2022). Oleh karena itu, penanganan masalah pembangunan manusia tetap menjadi agenda strategis yang membutuhkan komitmen tata kelola dari keenam pemerintah provinsi tersebut (Imam, 2019).

Rendahnya IPM secara kolektif pada enam provinsi di wilayah Papua tersebut justru menciptakan fenomena menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebagai provinsi yang berada dalam satu kawasan geografis penerima status istimewa melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, wilayah-wilayah tersebut telah menjadi penerima aliran dana transfer khusus dari pemerintah pusat dalam volume yang sangat besar dan dalam jangka waktu yang panjang, seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Provinsi	Dana Otonomi Khusus		Dana Tambahan Infrastruktur
		yang bersifat umum	yang telah ditentukan penggunaannya	
2018	Papua Barat	2.408.937.478	-	1.600.000.000
	Papua	5.620.854.115	-	2.400.000.000
	Total	8.029.791.593	-	4.000.000.000
2019	Papua Barat	2.507.241.496	-	1.440.553.463
	Papua	5.850.230.158	-	2.824.446.537
	Total	8.357.471.654	-	4.265.000.000
2020	Papua Barat	2.266.583.504	-	1.734.895.924
	Papua	5.288.694.844	-	2.711.275.076
	Total	7.555.278.348	-	4.446.171.000
2021	Papua Barat	2.266.748.342	-	1.748.505.429
	Papua	5.289.079.464	-	2.622.758.143
	Total	7.555.827.806	-	4.371.263.572

2022	Papua Barat	2.721.600.000	-	1.967.068.607
	Papua	5.783.400.000	-	2.404.194.963
	Total	8.505.000.000	-	4.371.263.570
2023	Papua Barat	665.426.268	831.782.835	803.970.737
	Papua Barat Daya	628.971.170	786.213.963	759.925.539
	Papua	697.537.158	871.921.448	734.634.275
	Papua Selatan	448.666.078	560.832.598	472.527.485
	Papua Tengah	734.493.413	918.116.766	773.555.973
	Papua Pegunungan	784.905.913	981.132.390	826.649.561
	Total	3.960.000.000	4.950.000.000	4.371.263.570
2024	Papua Barat	485.551.411	630.041.924	636.516.027
	Papua Barat Daya	604.812.025	652.742.113	612.263.725
	Papua	717.359.936	883.469.568	770.087.411
	Papua Selatan	547.131.349	704.887.057	665.304.462
	Papua Tengah	848.562.171	1.079.234.834	825.817.651
	Papua Pegunungan	1.073.576.144	1.395.865.798	861.274.294
	Total	4.276.993.036	5.346.241.294	4.371.263.570

Sumber: LKPP, diolah peneliti 2025

Pada Undang-Undang tentang Dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dijelaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) dirancang untuk membiayai pendidikan dan kesehatan, sementara dana tambahan infrastruktur (DTI) diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pada tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa sejak 2018 hingga 2022 Provinsi Papua mendapatkan data otsus lebih besar dibandingkan Provinsi Papua Barat tetapi memiliki IPM yang lebih rendah dari Provinsi Papua Barat. Hal ini mendorong terjadinya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), yaitu dengan pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pemekaran wilayah ini disahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merujuk pada pembentukan provinsi-provinsi baru hasil pemekaran, yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat di wilayah masing-masing, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat eksistensi wilayah adat dan budaya. Dengan pembentukan provinsi-provinsi baru ini, diharapkan pembangunan dapat lebih terfokus dengan rentang kendali yang lebih dekat, mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan, serta memberikan solusi terhadap tantangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua (Setkab, 2022). Harapan

akan adanya percepatan kesejahteraan pasca-pemekaran ini perlu diuji dengan melihat kondisi awal capaian pembangunan manusia di tiap-tiap daerah bawahnya.

Dalam menguji fenomena tersebut, analisis difokuskan pada klaster Daerah Otonom Baru yang terbentuk dari wilayah administrasi eks-Provinsi Papua induk, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Fokus terhadap ketiga wilayah DOB ini didasarkan pada variasi karakteristik sosial-ekonomi yang kontras dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat dan daerah pemekarannya, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya secara empiris didukung oleh kapasitas fiskal daerah yang relatif lebih stabil akibat kontribusi sektor industri di Kota Sorong serta tingkat indeks kesulitan geografis yang lebih rendah (BPS, 2023).

Sebaliknya, wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan menghadapi tantangan struktural yang lebih kompleks, seperti tingginya indeks kemahalan konstruksi akibat kondisi geografis pedalaman serta dinamika stabilitas keamanan wilayah yang secara langsung memengaruhi efisiensi penyerapan anggaran urusan wajib (Imam, 2019; Suriadin, 2022). Selain itu, kabupaten-kabupaten di bawah naungan ketiga DOB eks-Provinsi Papua ini terikat oleh homogenitas kepatuhan terhadap regulasi daerah dan formula pembagian dana Otsus yang sama sebelum terjadinya pemekaran tahun 2022 (Ramdan et al., 2023). Konvergensi masalah tata kelola anggaran dan rendahnya indikator pembangunan manusia pada klaster wilayah inilah yang mendasari pentingnya pengkajian akuntabilitas publik di daerah transisi tersebut (Bovens, 2005).

Sebagai gambaran mengenai disparitas capaian yang ada, Tabel 1.3 menyajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 20 kabupaten yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini:

Tabel 1. 3 IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Wilayah DOB Provinsi Papua

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	67,39	68,24	68,86
1	Merauke	69,38	69,98	71,92	72,33	73,06	74,00	74,53
2	Boven Digoel	60,83	61,51	65,29	65,38	66,33	67,32	68,16
3	Mappi	57,72	58,30	58,27	58,83	59,75	60,71	61,66
4	Asmat	49,37	50,37	53,99	54,80	55,80	56,85	57,63

	Rata-rata	59,33	60,04	62,37	62,84	63,74	64,72	65,50
B	PAPUA TENGAH	-	-	-	-	58,76	59,44	60,25
1	Mimika	73,15	74,13	74,19	74,48	75,08	75,91	76,85
2	Dogiyai	54,44	55,41	54,90	55,05	55,77	56,74	57,72
3	Deiyai	49,55	50,11	49,69	50,19	50,64	51,40	52,29
4	Nabire	67,70	68,53	69,34	69,66	70,46	71,36	72,28
5	Paniai	55,83	56,58	57,21	57,60	58,05	58,83	59,61
6	Intan Jaya	46,55	47,51	47,99	48,55	49,45	50,39	50,92
7	Puncak	41,81	42,70	43,18	43,31	43,99	44,71	45,70
8	Puncak Jaya	47,39	48,33	49,01	49,64	50,50	51,49	52,47
	Rata-rata	54,55	55,41	55,69	56,06	56,74	57,60	58,48
C	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	52,69	53,45	54,43
1	Nduga	29,42	30,75	33,74	35,13	36,51	37,68	38,88
2	Jawawijaya	56,82	57,79	62,16	62,85	63,85	64,81	65,38
3	Lanny Jaya	47,34	48,00	48,12	48,93	49,87	50,81	51,84
4	Tolikara	48,85	49,68	49,77	49,87	50,77	51,74	52,31
5	Mamberamo Tengah	46,41	47,23	49,19	49,97	50,96	51,98	52,50
6	Yalimo	47,13	48,08	48,34	49,01	49,90	50,87	51,85
7	Yahukimo	48,51	49,25	49,37	49,48	50,25	51,19	51,97
8	Pegunungan Bintang	44,22	45,21	45,77	46,61	47,54	48,51	49,69
	Rata-rata	46,09	47,00	48,31	48,98	49,96	50,95	51,80

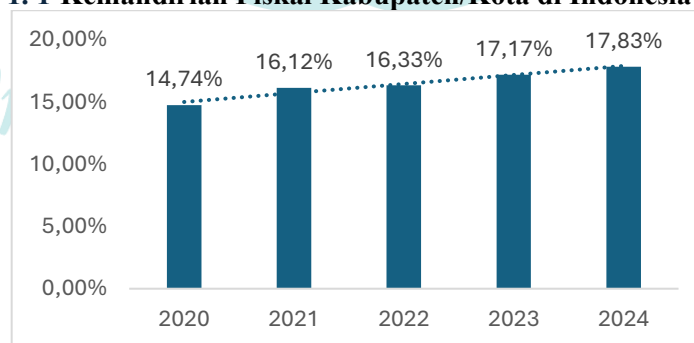
Sumber: BPS, diolah peneliti 2025

Berdasarkan tabel 1.2, Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan penerima dana otsus terbesar dibandingkan dengan Provinsi Papua lainnya, tetapi capaian IPM di kedua provinsi tersebut masih tergolong rendah dan menjadi dua posisi terbawah secara nasional. Dapat dilihat pada tabel 1.3, kabupaten-kabupaten di provinsi pemekaran ini umumnya memiliki nilai IPM yang relatif rendah. Sebaliknya, Provinsi Papua Selatan menunjukkan capaian IPM yang lebih menonjol dibandingkan provinsi Papua lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya alokasi dana otsus tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan IPM. Dengan kata lain, dukungan fiskal yang besar belum tentu menghasilkan kinerja pembangunan manusia yang optimal. Pembangunan manusia bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kemandirian fiskal, rasio desentralisasi dan ketergantungan fiskal, keserasian belanja daerah, efektivitas pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan pemerintah daerah, serta alokasi belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun demikian, mengingat luasnya faktor yang memengaruhi

pembangunan manusia, penelitian ini membatasi fokus analisis pada beberapa variabel utama, yaitu kemandirian fiskal, alokasi belanja pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta kinerja keuangan pemerintah daerah. Pembatasan ini dilakukan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam dan terarah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian IPM di provinsi-provinsi tersebut.

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Saputra et al., 2025). Kemandirian fiskal dapat dilihat melalui perbandingan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. PAD yang tinggi mencerminkan kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Hal ini juga menggambarkan berjalannya proses desentralisasi fiskal karena kontribusi PAD yang tinggi menunjukkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengatur keuangan di daerahnya sendiri (Badan Pusat Statistik, 2025c). Daerah dengan kemandirian fiskal yang lebih tinggi, seringkali memiliki insentif yang lebih kuat untuk berinovasi, meningkatkan daya ungkit PAD, memaksimalkan sumber daya yang tersedia, dan mengalokasikan anggaran secara lebih hati-hati dan sesuai dengan preferensi konstituennya (Dharmawati et al., 2024). Sebaliknya, daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat, dikhawatirkan dapat mengalami *flypaper effect*, di mana pemerintah kurang mampu memaksimalkan pendapatan sehingga efektivitas penggunaan anggaran belum tercapai sepenuhnya (Fitrianti et al., 2025). Dalam lima tahun terakhir, kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota di Indonesia ditunjukkan oleh grafik di bawah ini.

Gambar 1. 1 Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024



Sumber: BPS, diolah peneliti 2025

Gambar 1.1 tersebut memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengalami tren positif, tetapi masih jauh dari kata optimal karena hanya mencapai 17,83% saja. Dengan kata lain, pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia masih sangat bergantung dengan transfer pusat untuk membiayai kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing. Kemandirian fiskal ini menjadi lebih mengkhawatirkan pada 20 kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah, Selatan, dan Pegunungan yang notabenenya merupakan daerah baru hasil pemekaran dengan basis ekonomi yang masih terbatas namun menerima aliran Dana Otsus yang sangat besar.

Tabel 1. 4 Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di DOB Provinsi Papua (dalam %)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Kemandirian Fiskal 2024
PAPUA SELATAN	
Merauke	7,40
Boven Digoel	2,12
Mappi	1,97
Asmat	2,26
Rata-rata	3,44
PAPUA TENGAH	
Mimika	34,39
Dogiyai	2,07
Deiyai	14,03
Nabire	9,42
Paniai	2,12
Intan Jaya	1,77
Puncak	0,64
Puncak Jaya	0,77
Rata-rata	8,15
PAPUA PEGUNUNGAN	
Nduga	0,30
Jawawijaya	4,43
Lanny Jaya	0,70
Tolikara	1,68
Mamberamo Tengah	0,71
Yalimo	1,06
Yahukimo	0,83
Pegunungan Bintang	0,77
Rata-rata	1,31

Sumber: BPS, diolah peneliti 2025

Tabel 1.4 tersebut memperlihatkan kemandirian fiskal kabupaten di wilayah pemekaran Provinsi Papua pada tahun 2024 sangat rendah, kemandirian fiskal ini bahkan berada jauh di bawah rata-rata nasional Indonesia. Dengan rendahnya kemandirian fiskal ini, pendapatan daerah menjadi lebih besar diperoleh dari pusat. Namun, injeksi fiskal yang masif dan berkelanjutan ini ternyata belum berhasil mengangkat IPM wilayah Papua ke level yang setara dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, bahkan yang tidak mendapat perlakuan khusus sekalipun (Oktavian & Adi, 2021). Oleh karena itu, fenomena ini mendorong perlunya mengkaji lebih dalam bagaimana alokasi pengeluaran pemerintah, khususnya belanja fungsi pendidikan dan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan adanya pengaruh kemandirian fiskal terhadap pembangunan manusia yang diukur melalui Indek Pembangunan Manusia (IPM). Rahma et al. (2022) menemukan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bombana. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Rinaldi et al. (2025) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Kalimantan Tengah. Selain itu, Siburian, Abdullah, dan Firmansyah (2021) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai proksi kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kalimantan Tengah. Hasil yang sejalan diperoleh Hobrouw et al (2021) di Papua Barat yang menunjukkan bahwa PAD sebagai proksi dari kemandirian fiskal berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian Ahmat et al. (2025) juga memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kemandirian fiskal daerah dan IPM. Dalam konteks ini, kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskalnya dipandang penting untuk mendukung pembangunan daerah.

Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Rosita & Muzdalifah (2023) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah justru berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM di Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu, Winarni et al. (2022) mengungkapkan bahwa kemandirian fiskal tidak memiliki hubungan yang kuat dengan IPM. Sejumlah penelitian menunjukkan

bahwa kemandirian fiskal memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan manusia. Penelitian Simatupang et al. (2024) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan kapasitas fiskal daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun demikian, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Studi mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan manusia menemukan bahwa pengaruh kapasitas fiskal terhadap peningkatan IPM tidak selalu signifikan, karena efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengelolaan anggaran serta karakteristik daerah (Susilo et al., 2026).

Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian, sehingga membuka ruang penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan faktor-faktor yang mungkin memoderasi hubungan tersebut. Secara keseluruhan, variasi hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara kemandirian fiskal dan IPM bersifat kontekstual serta dipengaruhi oleh karakteristik daerah dan faktor-faktor pembangunan lainnya.

Selain kemandirian fiskal, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan menjadi salah satu instrumen strategis dalam upaya meningkatkan IPM. Di sektor pendidikan, belanja daerah yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru, serta penyediaan buku dan alat pembelajaran, secara langsung ditujukan untuk meningkatkan dimensi pengetahuan dalam IPM, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Kurnia et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 31 ayat 4, pemerintah daerah harus mengalokasikan APBD minimal 20 persen untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Badan Pusat Statistik, 2025). Namun, meski diamanatkan secara konstitusional, realisasi alokasi belanja pendidikan di tingkat daerah masih menunjukkan variasi yang lebar, dengan beberapa wilayah belum mencapai target yang ditetapkan, sementara lainnya bahkan melampauinya.

**Tabel 1. 5 Belanja Pendidikan di Kabupaten/Kota Wilayah DOB Provinsi Papua
(dalam %)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Belanja Pendidikan 2024
PAPUA SELATAN	
Merauke	36,32
Boven Digoel	6,68
Mappi	26,06
Asmat	19,84
Rata-rata	22,26
PAPUA TENGAH	
Mimika	19,16
Dogiyai	22,53
Deiyai	22,97
Nabire	20,91
Paniai	36,94
Intan Jaya	13,03
Puncak	9,24
Puncak Jaya	9,25
Rata-rata	19,25
PAPUA PEGUNUNGAN	
Nduga	8,20
Jawawijaya	18,71
Lanny Jaya	19,59
Tolikara	11,91
Mamberamo Tengah	16,40
Yalimo	10,94
Yahukimo	16,92
Pegunungan Bintang	11,22
Rata-rata	14,34

Sumber: BPS, diolah peneliti 2025

Pada tabel 1.5 tersebut, terlihat bahwa belanja pendidikan pada 20 kabupaten/kota di provinsi pemekaran tersebut rata-rata masih berada di bawah 20 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa meski diatur dalam undang-undang, penggunaan anggaran untuk pendidikan di wilayah-wilayah pemekaran Papua masih belum maksimal. Rendahnya anggaran pendidikan ini bisa memperlambat peningkatan kualitas pendidikan yang menjadi bagian penting dari IPM, terutama di daerah-daerah dengan kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan

infrastruktur (Khonsa et al., 2025). Meskipun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah pemekaran Papua masih menghadapi tantangan besar, beberapa daerah mulai menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam merespons ketertinggalan tersebut. Sebagai contoh, Kabupaten Mappi di Provinsi Papua Selatan yang memiliki angka IPM sebesar 61,66 pada tahun 2024, telah mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 26,06% dari anggaran daerahnya. Angka ini tidak hanya melampaui batas minimal 20 persen yang diamanatkan konstitusi, tetapi juga diwujudkan dalam program strategis yang berorientasi langsung pada hasil (*outcome-based*) sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana daerah.

Kabupaten Mappi merealisasikan investasi anggaran daerah secara masif melalui kemitraan strategis dengan institusi pendidikan tinggi nasional, seperti Universitas Negeri Jakarta, untuk membiayai program beasiswa sarjana kepada 100 pemuda asli daerah (Humas UNJ, 2025). Program investasi sumber daya manusia yang menargetkan perempuan ini merupakan bagian dari program unggulan Bupati Mappi untuk mencetak 1.000 sarjana asli Papua dalam kurun waktu lima tahun. Para mahasiswi tersebut didistribusikan ke program studi yang krusial bagi pembangunan SDM daerah, yakni Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK), dan Pendidikan Bahasa Inggris. Intervensi pembiayaan penuh terhadap sektor pendidikan wajib ini menjadi bentuk implementasi nyata dari pertanggungjawaban penyerapan dana publik yang secara langsung diarahkan untuk menstimulus komponen pembentuk IPM, khususnya indikator rata-rata lama sekolah.

Belanja pemerintah pada sektor pendidikan, seperti halnya pada Kabupaten Mappi, secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian Fitria et al. (2026) menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM karena dapat meningkatkan indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah dan tingkat pendidikan masyarakat. Namun demikian, beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda. Studi mengenai realisasi anggaran pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan tidak

selalu berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM, terutama ketika implementasi anggaran belum berjalan secara optimal atau tidak diikuti dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan (Syukri, 2025). Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh belanja pendidikan terhadap IPM masih menjadi perdebatan dalam literatur empiris. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji kembali hubungan tersebut, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti provinsi-provinsi pemekaran di Papua.

Selain pendidikan, belanja kesehatan merupakan pilar penting lain dalam upaya meningkatkan IPM. Di sektor kesehatan, belanja untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan, dan peningkatan jumlah tenaga medis, secara langsung berdampak pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang tercermin dalam angka harapan hidup saat lahir (Kurnia et al., 2023). Di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis yang berat dan keterbatasan infrastruktur kesehatan, alokasi anggaran kesehatan yang tepat sasaran menjadi semakin penting untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

Tabel 1. 6 Belanja Kesehatan di Kabupaten/Kota Wilayah DOB Provinsi Papua (dalam %)

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Belanja Kesehatan 2024
PAPUA SELATAN	
Merauke	16,67
Boven Digoel	0,02
Mappi	12,19
Asmat	15,12
Rata-rata	11,00
PAPUA TENGAH	
Mimika	13,90
Dogiyai	11,90
Deiyai	8,88
Nabire	20,11
Paniai	14,38
Intan Jaya	10,70
Puncak	13,02
Puncak Jaya	14,21

Rata-rata	13,39
PAPUA PEGUNUNGAN	
Nduga	14,90
Jawawijaya	16,87
Lanny Jaya	19,19
Tolikara	25,81
Mamberamo Tengah	10,44
Yalimo	5,94
Yahukimo	14,54
Pegunungan Bintang	12,71
Rata-rata	15,05

Sumber: BPS, diolah peneliti 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.6, belanja kesehatan di 20 kabupaten/kota wilayah pemekaran Papua pada tahun 2024 menunjukkan variasi alokasi yang cukup beragam. Rata-rata belanja kesehatan di ketiga provinsi pemekaran berkisar antara 11,00% hingga 15,05%, dengan beberapa kabupaten seperti Tolikara (25,81%) dan Nabire (20,11%) menunjukkan alokasi yang relatif tinggi, sementara kabupaten lain seperti Boven Digoel (0,02%) Yalimo (5,94%) dan Deiyai (8,88%) masih berada pada level yang lebih rendah. Meski demikian, tingginya proporsi belanja kesehatan di beberapa daerah ini belum serta-merta mencerminkan kualitas layanan kesehatan yang merata, mengingat tantangan geografis dan infrastruktur yang masih menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan bahwa sekadar memenuhi proporsi anggaran tidak cukup jika tidak didukung oleh efektivitas penyerapan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel (Suryani et al., 2025).

Belanja pemerintah pada sektor kesehatan juga dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan pembangunan manusia karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan angka harapan hidup. Penelitian Rosyid et al. (2025) menunjukkan bahwa sektor kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap IPM karena peningkatan layanan kesehatan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh belanja kesehatan terhadap IPM tidak selalu signifikan. Beberapa studi menemukan bahwa meskipun anggaran kesehatan meningkat, dampaknya

terhadap IPM sering kali terbatas karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti distribusi layanan kesehatan, kondisi geografis, serta efektivitas pengelolaan anggaran daerah (Oktafiyana & Muliati, 2024).

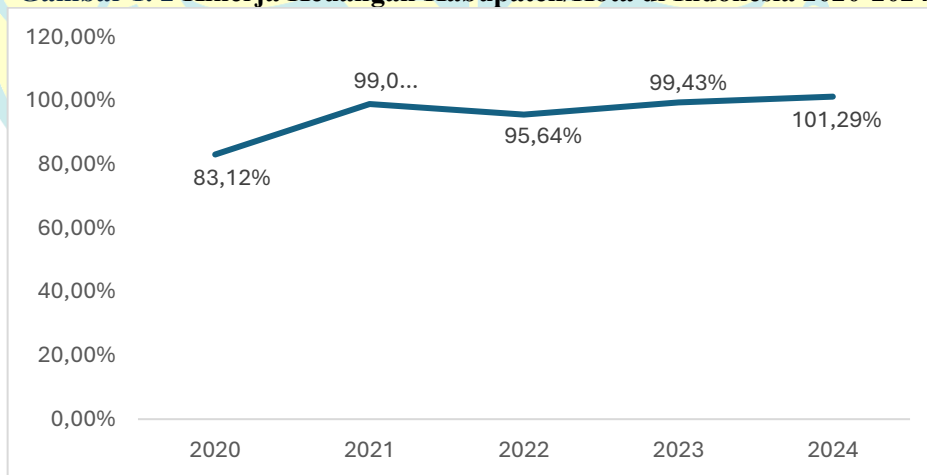
Tinjauan terhadap literatur empiris sebelumnya mengenai hubungan langsung antara variabel-variabel fiskal ini dengan IPM justru menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Penelitian Ahmat et al. (2025), Suhendi & Astuti (2023), Julistia et al. (2025), serta Nadhi et al. (2025) menemukan bahwa pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Belanja pada sektor ini dipercaya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan IPM. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Sudharma et al. (2024) serta Damanik et al (2022) menyatakan bahwa pengeluaran pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Selanjutnya, Z et al. (2023) menemukan bahwa belanja pada kedua sektor tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Bahkan, Lubis et al. (2024) menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan adanya keraguan mengenai hubungan langsung antara belanja sektor pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan manusia, yang menjadi salah satu gap penting dalam literatur yang perlu digali lebih lanjut.

Inkonsistensi hasil penelitian ini mengindikasikan adanya *missing link* dalam model penelitian yang selama ini digunakan. Mayoritas penelitian menguji hubungan langsung antara variabel keuangan (kemandirian fiskal, belanja prioritas) dengan IPM. Hal ini mencerminkan sinyal bahwa model hubungan langsung (*direct effect*) tidak lagi memadai. Besaran alokasi anggaran dan tingkat ketergantungan fiskal saja tidak cukup menjadi penentu, terdapat faktor kondisional (*contingency factor*) atau variabel ketiga yang kemungkinan besar berperan dalam memperkuat atau melemahkan hubungan sebab-akibat tersebut. Beberapa penelitian memasukkan menggunakan belanja modal sebagai variabel moderasi, namun belum ada penelitian yang secara spesifik mempertimbangkan peran kualitas tata kelola keuangan sebagai faktor kontinjensi. Faktor kualitas tata kelola yang diduga

paling krusial dalam memoderasi hubungan antara kemandirian fiskal, pengeluaran sektor pendidikan, dan pengeluaran sektor kesehatan terhadap IPM adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks inilah kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi variabel moderasi yang sangat penting untuk diteliti.

Kinerja keuangan merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangannya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah (Siswanto & Maylani, 2022). Dengan demikian, anggaran pendidikan dan kesehatan yang berasal dari kemandirian fiskal atau transfer pusat, hanya akan terkonversi secara optimal menjadi peningkatan kualitas sekolah, pelayanan kesehatan, dan akhirnya IPM, jika dikelola dengan kinerja keuangan yang tinggi atau dalam pengawasan yang kuat, tata kelola keuangan yang baik, serta akuntabel (Isman et al., 2025). Sebaliknya, kinerja keuangan yang lemah berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran, sekalipun besaran alokasi untuk sektor-sektor krusial tersebut relatif tinggi.

Gambar 1. 2 Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024



Sumber: BPS, diolah peneliti 2025

Berdasarkan grafik 1.2 tersebut, kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di tingkat nasional menunjukkan perkembangan positif, dengan rata-rata capaian di atas 95% sejak tahun 2021, bahkan mencapai 101,29% pada tahun 2024. Kinerja keuangan yang dilihat melalui besaran realisasi PAD yang didapatkan terhadap anggaran PAD yang ditetapkan ini dapat dikatakan efektif

apabila rasio yang dicapai minimal 100 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Namun, capaian nasional yang tinggi ini belum tentu mencerminkan kondisi serupa di setiap wilayah, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik khusus seperti wilayah pemekaran Papua.

**Tabel 1. 7 Kinerja Keuangan di Kabupaten/Kota Wilayah DOB Provinsi Papua
(dalam %)**

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Kinerja Keuangan 2024
PAPUA SELATAN	
Merauke	105,52
Boven Digoel	97,98
Mappi	367,60
Asmat	77,44
Rata-rata	162,14
PAPUA TENGAH	
Mimika	252,52
Dogiyai	426,45
Deiyai	153,87
Nabire	207,36
Paniai	254,26
Intan Jaya	170,56
Puncak	59,17
Puncak Jaya	39,63
Rata-rata	195,48
PAPUA PEGUNUNGAN	
Nduga	10,30
Jawawijaya	88,18
Lanny Jaya	54,38
Tolikara	977,83
Mamberamo Tengah	482,45
Yalimo	45,42
Yahukimo	36,19
Pegunungan Bintang	41,25
Rata-rata	204,95

Sumber: BPS, diolah peneliti 2025

Berdasarkan tabel 1.7 kinerja keuangan pada 20 kabupaten/kota di wilayah pemekaran Papua tahun 2024 menunjukkan variasi yang sangat ekstrem dan cenderung tidak stabil. Di satu sisi, beberapa kabupaten seperti Tolikara (977,83%),

Mamberamo Tengah (482,45%), Dogiyai (426,45%), dan Mimika (252,52%) mencatat realisasi PAD yang sangat tinggi yang dapat mengindikasikan adanya pendapatan asli daerah yang melampaui target perencanaan awal. Di sisi lain, terdapat kabupaten dengan kinerja keuangan yang sangat rendah, seperti Nduga (10,30%), Yahukimo (36,19%), dan Puncak Jaya (39,63%), yang mencerminkan lemahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan potensial dan/atau ketidakakuratan dalam menyusun target anggaran PAD. Variasi yang tajam ini menciptakan kesenjangan yang dalam pada kapasitas fiskal antarkabupaten, di mana ketidakstabilan realisasi PAD dapat berdampak pada ketidakpastian perencanaan anggaran dan efektivitas alokasi belanja publik untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah secara teoritis berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan daerah, karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Inten et al., 2025). Namun demikian, hasil penelitian empiris mengenai hubungan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dan IPM menunjukkan hasil yang beragam.

Penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan investasi sosial (Jin & Jakovljevic, 2023). Inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap IPM dapat dilihat dari hasil penelitian Rahma et al. (2022) serta Satriawan & Sirat (2021) menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, Nirwana et al. (2025) serta Soleh et al. (2022) menyatakan bahwa efektivitas PAD (sebagai salah satu proksi kinerja keuangan) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Di sinilah terletak celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak ditemukan dalam literatur. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memperlakukan variabel-variabel fiskal dan variabel tata kelola secara terpisah atau

sebagai variabel independen. Kajian yang secara eksplisit dan sistematis memposisikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kemandirian fiskal serta belanja sektor prioritas dengan IPM masih sangat terbatas. Hal ini terlihat pada penelitian-penelitian yang memandang kinerja keuangan sebagai *outcome*, seperti yang dilakukan oleh (Khoiriyyah & Alliyah, 2022; Lubis et al., 2025) atau sebagai prediktor langsung terhadap IPM, seperti yang dilakukan oleh (Hardana et al., 2022; Hendri & Yafiza, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan literatur mengenai peran kinerja keuangan dalam memperkuat atau memperlemah efektivitas anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat, yang sekaligus menjadi nilai kebaruan (*originality*) penelitian ini.

Gap ini menunjukkan bahwa hubungan langsung antara variabel fiskal, seperti kemandirian fiskal dan belanja sektor prioritas, dengan IPM masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sering kali tidak konsisten. Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan adanya variabel lain yang berperan sebagai faktor penengah atau pemoderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel-variabel fiskal tersebut dengan IPM. Salah satu variabel yang patut dipertimbangkan adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, yang diduga memiliki peran penting dalam memperjelas dan mempengaruhi hubungan sebab-akibat antara variabel fiskal dan pembangunan manusia.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan tidak hanya menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menghimpun dan membelanjakan sumber daya fiskal, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola anggaran yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas (Mardiasmo, 2018). Kondisi ini menjadi penting karena ketersediaan kapasitas fiskal yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan hasil pembangunan apabila tidak didukung oleh mekanisme pengelolaan keuangan yang memadai.

Kemandirian fiskal pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Namun demikian, keleluasaan tersebut

dapat menghasilkan dampak yang berbeda-beda tergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya (Tangkilisan, 2007). Dalam kondisi tertentu, kemandirian fiskal yang tinggi belum tentu mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal apabila tidak didukung oleh kinerja keuangan yang baik.

Dengan demikian, kinerja keuangan daerah dapat dipandang sebagai faktor yang menentukan sejauh mana kapasitas fiskal mampu diterjemahkan menjadi *output* dan *outcome* pembangunan yang nyata, khususnya yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kinerja keuangan yang baik tidak hanya menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, tetapi juga mencerminkan konsistensi dalam menetapkan prioritas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Siregar, 2023b). Dalam kondisi seperti ini, sumber daya fiskal yang tersedia dapat dialokasikan secara lebih terarah pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup, sehingga hasil pembangunan menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

Sebaliknya, apabila kinerja keuangan daerah kurang baik, maka potensi fiskal yang dimiliki daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakefisienan dalam penganggaran, kurang optimalnya realisasi belanja, atau lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program (Siregar, 2023b). Akibatnya, meskipun suatu daerah memiliki kapasitas fiskal yang relatif besar, dampaknya terhadap peningkatan IPM dapat menjadi terbatas karena tidak didukung oleh tata kelola keuangan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan bukan hanya aspek administratif, tetapi juga faktor substantif yang menentukan kualitas hasil pembangunan.

Lebih lanjut, peran kinerja keuangan daerah menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan efektivitas pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut merupakan komponen utama dalam pembentukan IPM (BPS, 2021), sehingga keberhasilan belanja pada sektor ini sangat bergantung pada bagaimana anggaran direncanakan, direalisasikan, dan diawasi. Kinerja keuangan yang baik akan memastikan bahwa

belanja pendidikan dan kesehatan tidak hanya terserap secara formal, tetapi juga menghasilkan *output* yang nyata, seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, serta perbaikan indikator-indikator pembangunan manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kinerja keuangan daerah memiliki potensi untuk memengaruhi kuat-lemahnya hubungan antara variabel-variabel fiskal tersebut dengan IPM, baik dalam konteks kemandirian fiskal maupun belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Untuk menambah kedalaman analisis, periode penelitian ini sengaja dipilih dari tahun 2018 hingga 2024, sebuah rentang waktu yang mengandung dinamika kebijakan yang berubah secara signifikan. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa periode ini merepresentasikan momentum transisi yang paling krusial dalam tata kelola keuangan dan pemerintahan di Papua. Periode tujuh tahun ini dipilih karena secara historis merangkum tiga dinamika kebijakan utama yang berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal dan capaian pembangunan manusia secara fundamental.

Pertama, dinamika sebelum pemekaran dan evaluasi akhir UU Otsus awal (sebelum 2021), di mana wilayah-wilayah kabupaten masih beroperasi di bawah struktur otonomi lama. Kedua, dinamika transisi regulasi dengan disahkannya UU No. 2 Tahun 2021, yang membawa paradigma baru dalam akuntabilitas dan desentralisasi fiskal. Ketiga, dinamika pasca-pemekaran (2022–2024) saat terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB), yang secara drastis merombak postur kemandirian daerah dan menuntut adaptasi efektivitas kinerja dari pemerintahan di masing-masing kabupaten.

Rangkaian transisi struktural dan kebijakan yang terjadi dalam satu rentang waktu tersebut menjadikan periode 2018-2024 sebagai jendela observasi yang komprehensif. Observasi yang ditarik secara utuh dalam periode ini diyakini mampu memotret bagaimana kapasitas kemandirian fiskal serta kualitas tata kelola (efektivitas) benar-benar teruji dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tengah kondisi otonomi yang fluktuatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menganalisis hubungan antara aspek fiskal daerah, yaitu Kemandirian Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah pada sektor

Pendidikan serta Kesehatan, terhadap capaian pembangunan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian tentang IPM selama ini banyak menguji pengaruh langsung variabel-variabel fiskal, sementara kajian yang secara eksplisit memposisikan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi yang menentukan efektivitas transformasi anggaran menjadi *outcome* pembangunan manusia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan bahwa meningkatkan alokasi anggaran saja tidaklah cukup. Justru hal yang lebih krusial adalah membangun mekanisme tata kelola keuangan yang berkinerja tinggi untuk memastikan setiap rupiah belanja publik benar-benar efektif dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.

Selain itu, hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran dan evaluasi mendalam tentang efektivitas kebijakan fiskal, khususnya pada daerah khusus seperti Papua yang menerima aliran dana transfer khusus yang besar namun memiliki tantangan pembangunan manusia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam perumusan kebijakan otonomi daerah dan desain transfer fiskal ke depan, agar lebih berbasis *outcome* dan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan daerah dalam menyerap dan mengelola anggaran. Dengan periode penelitian yang mencakup fase normal, krisis, dan pemulihan (2018-2024), analisis ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang ketahanan dan responsivitas sistem fiskal daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan. Berdasarkan fenomena dan celah penelitian yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kemandirian Fiskal Dan Alokasi Belanja Prioritas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi-provinsi pemekaran Papua (Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan) tetap berada pada level terendah di Indonesia, meskipun wilayah ini telah menerima alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang sangat besar sejak tahun 2001 dan kemudian diperkuat melalui

pembentukan provinsi-provinsi baru pada tahun 2022 dengan tujuan mempercepat pembangunan. Paradoks antara besarnya alokasi dana dengan rendahnya capaian pembangunan manusia ini mengindikasikan bahwa permasalahan bukan semata-mata berasal dari keterbatasan sumber daya keuangan, melainkan dari aspek manajemen dan tata kelola keuangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien.

Meskipun secara teoritis terdapat hubungan yang kuat antara kebijakan fiskal daerah dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bukti empiris menunjukkan hasil yang inkonsisten. Celah penelitian (*research gap*) utama terletak pada terbatasnya kajian yang mengintegrasikan aspek tata kelola keuangan sebagai faktor kondisional yang menentukan efektivitas transformasi anggaran menjadi *outcome* riil. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji hubungan langsung antara variabel fiskal dan IPM, atau memposisikan kinerja keuangan sebagai variabel independen, sehingga belum mampu menjelaskan mengapa daerah dengan anggaran besar dapat gagal meningkatkan IPM, sementara daerah dengan sumber daya terbatas justru berhasil. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang memposisikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel pemoderasi untuk menjawab mengapa hubungan antara kapasitas fiskal (kemandirian dan alokasi) dengan hasil pembangunan manusia bervariasi antar daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kemandirian fiskal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di wilayah DOB Papua periode 2018-2024?
2. Apakah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di wilayah DOB Papua periode 2018-2024?

3. Apakah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di wilayah DOB Papua periode 2018-2024?
4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di wilayah DOB Papua periode 2018-2024?
5. Apakah kinerja keuangan memoderasi pengaruh kemandirian fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di wilayah DOB Papua periode 2018-2024?
6. Apakah kinerja keuangan memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di wilayah DOB Papua periode 2018-2024?
7. Apakah kinerja keuangan memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten di wilayah DOB Papua periode 2018-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
4. Menganalisis dan menguji pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pemerintah daerah

kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

5. Menganalisis dan menguji peran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam memoderasi pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap IPM.
6. Menganalisis dan menguji peran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam memoderasi pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM.
7. Menganalisis dan menguji peran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam memoderasi pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap IPM.

1.5 Manfaat Penelitian

Studi yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat baik akademis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

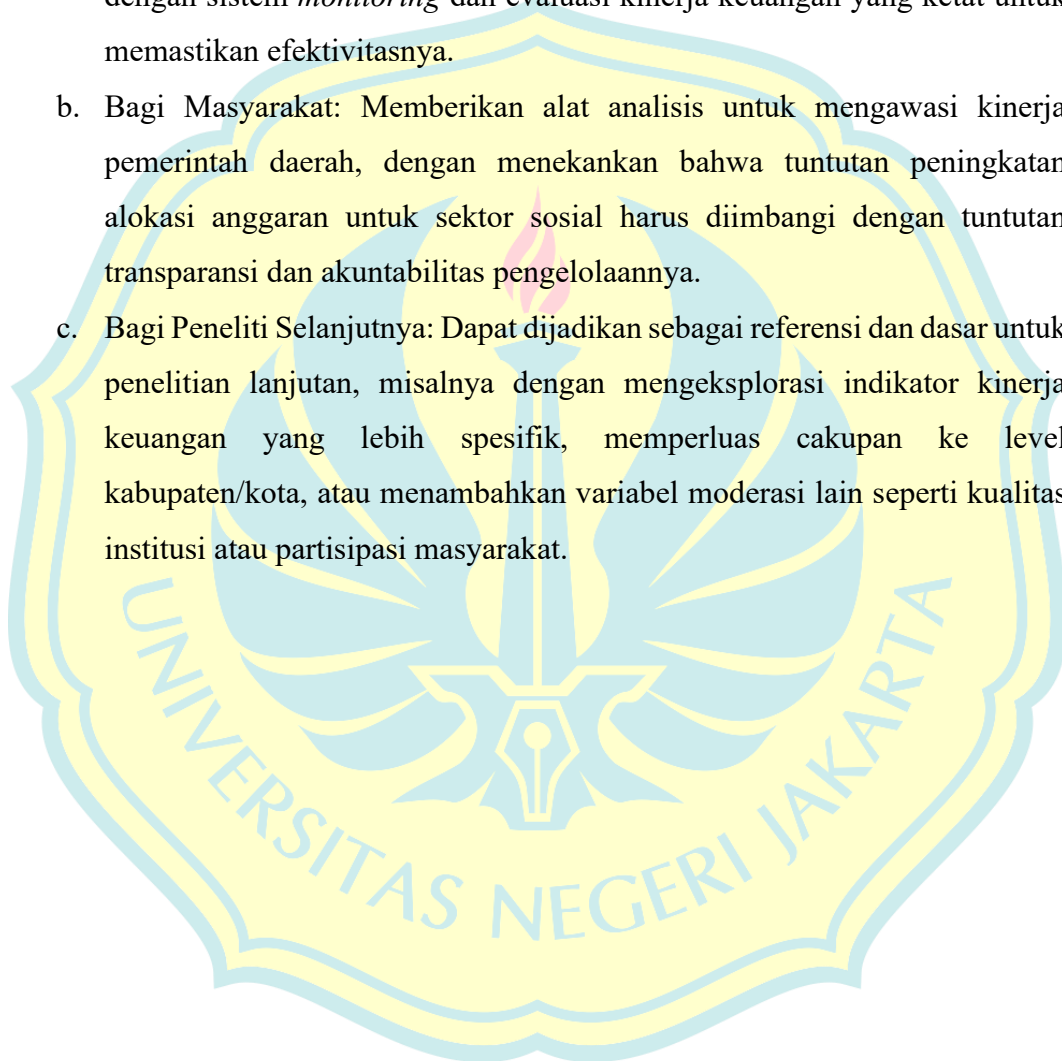
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemahaman empiris dalam bidang ekonomi publik, keuangan daerah, dan pembangunan manusia, khususnya dalam menguji model moderasi kinerja keuangan pada pengaruh variabel fiskal terhadap IPM. Pendekatan ini menawarkan wawasan yang lebih kompleks dan realistis untuk memahami mengapa hubungan antara input kebijakan (anggaran) dan *outcome* pembangunan (IPM) sering kali tidak linier. Selain itu, penelitian ini mendukung teori Akuntabilitas Publik, yang menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel, alokasi dana untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan dapat lebih efektif, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan manusia (IPM).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terutama terkait desain sistem transfer fiskal (seperti Dana Otsus) yang tidak hanya melihat besaran alokasi, tetapi juga

memperkuat prasyarat kinerja keuangan dan akuntabilitas daerah penerima, penyusunan kebijakan penguatan kemandirian fiskal yang diiringi dengan peningkatan kapasitas fiskal *governance*, serta menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas belanja pendidikan dan kesehatan yang harus disertai dengan sistem *monitoring* dan evaluasi kinerja keuangan yang ketat untuk memastikan efektivitasnya.

- b. Bagi Masyarakat: Memberikan alat analisis untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah, dengan menekankan bahwa tuntutan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor sosial harus diimbangi dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar untuk penelitian lanjutan, misalnya dengan mengeksplorasi indikator kinerja keuangan yang lebih spesifik, memperluas cakupan ke level kabupaten/kota, atau menambahkan variabel moderasi lain seperti kualitas institusi atau partisipasi masyarakat.



Intelligentia - Dignitas